

PARADIGMA KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI

Paradigma of Bilateral and Regional Cooperation in Trade and Investment



Andri Hanindyo Wibowo, S.Pt, M.Si

Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda/ Koordinator Pemasaran
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sudah tidak diragukan bahwa isu ekonomi menjadi salah satu prioritas penting dalam hubungan luar negeri, dimana pertumbuhan ekonomi suatu negara selalu menjadi sorotan utama publik internasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat tergambarkan dari nilai Pendapatan Nasional atau Pendapatan Domestik Bruto yang kita kenal dengan PDB. Tiga komponen yang sangat mempengaruhi tingkat PDB suatu negara adalah yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor. Ke tiga komponen tersebut saling berhubungan dan apabila ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada dua komponen lainnya.

Ketiga komponen ini sangat berkaitan karena Investasi merupakan upaya meningkatkan produksi dalam bisnis melalui penanaman modal, kemudian hal ini juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Sementara Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi adanya interdependensi kebutuhan, bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi dan struktur sosial, sehingga tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi, itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas saat ini dalam kerangka kerjasama internasional saat ini terdapat paradigma

There is no doubt that economic issues are one of the important priorities in foreign relations, where a country's economic growth has always been the focus of the international public. The rate of economic growth of a country can be described from the value of National Income or Gross Domestic Product which we know as GDP. The three components that greatly affect a country's GDP level are household consumption, the business sector for investment, and the foreign sector for export-import. The three components are interconnected and if there is a decrease in one component, it will directly affect the other two components.

These three components are closely related because investment is an effort to increase production in the business through investment, then this will also have an impact on increasing household consumption. Meanwhile, export-import activities are based on conditions of interdependence of needs, that each country has different characteristics, both natural resources, climate, geography, economic structure, and social structure, so that no country is truly independent, because one another needs each other and complement each other, that's what causes international trade.

Based on the explanation above, in the current framework of international cooperation, there is a new paradigm, that is, previously cooperation



merupakan paradigma baru, yaitu yang semula perjanjian kerjasama lebih menitikberatkan pada tujuan memperlancar arus aliran barang namun saat ini investasi menjadi salah satu isu dalam kerjasama perdagangan internasional dan masuk di dalam dalam klausul perjanjian kerjasama antara negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Sehingga saat ini jenis perjanjian perdagangan saat ini berubah menjadi perjanjian ekonomi yang lebih komprehensif antara negara. Berikut ini akan diulas perjanjian Kerjasama perdagangan/ekonomi internasional terkait perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional.

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau yang kita kenal dengan IA-CEPA adalah perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia yang mulai berlaku sejak 5 Juli 2020. Perjanjian ini merupakan perjanjian komprehensif, dibangun berdasarkan perjanjian-perjanjian multilateral dan regional yang telah ada termasuk Perjanjian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – Selandia Baru (AANZFTA). Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerjasama untuk era baru hubungan ekonomi yang lebih erat antara Australia dan Indonesia dan membuka pasar dan peluang baru

agreements focused more on the goal of facilitating the flow of goods, but now investment is one of the issues in international trade cooperation and is included in the cooperation agreement between countries bilaterally, regionally, and multilaterally. So that at this time the current type of trade agreement changed to a more comprehensive economic agreement between countries. In the following, we will review international trade / economic cooperation agreements related to bilateral and regional trade and investment.

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement

The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement or known as IA-CEPA is a bilateral cooperation agreement between Indonesia and Australia which came into effect on 5 July 2020. This agreement is a comprehensive agreement, building on existing multilateral and regional agreements including the Agreement Establishment of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). This agreement aims to create a framework for cooperation for a new era of closer economic ties between Australia and Indonesia and open new markets and opportunities for business.

untuk bisnis.

Beberapa Hasil dan manfaat utama IA-CEPA dalam hal akses pasar dan investasi antara lain bahwa IA-CEPA akan memberikan akses yang lebih baik dan lebih pasti ke pasar Indonesia untuk eksportir Australia serta dilakukannya eliminasi tarif atau melakukan pengaturan preferensi untuk lebih dari 99% Pos tarif. Perjanjian ini juga mencakup kerangka kerja untuk perdagangan dan yang terkait investasi melalui program kerja yang didanai bersama. Program kerja bersama ini akan mendukung kegiatan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang terkait perdagangan untuk memperkuat hubungan komersial dan membantu menstimulasi investasi dua arah.

■ Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP)

Untuk merespon berbagai dinamika perubahan perekonomian dunia serta dalam rangka menjadikan penguatan pasar dunia yang tetap terbuka sebagai bagian esensial dalam pemulihan dan penguatan perekonomian global, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian ***Regional Comprehensive Economic Partnership*** (RCEP) pada 15 November 2020. RCEP merupakan kesepakatan regional trading block terbesar di dunia, yang meliputi 30% dari PDB dunia, 27% dari perdagangan dunia, 29% dari investasi asing langsung dunia dan 29% dari populasi dunia

Perjanjian RCEP merupakan inisiatif Indonesia pada saat menjadi Ketua ASEAN di 2011, di mana Indonesia kemudian dipercaya menjadi koordinator yang memimpin jalannya perundingan Perjanjian RCEP. Saat ini, sudah ada 7 Negara ASEAN (Brunei,

Some of the main results and benefits of the IA-CEPA in terms of market access and investment include that the IA-CEPA will provide better and more certain access to the Indonesian market for Australian exporters as well as eliminating tariffs or making preference arrangements for more than 99% of tariff headings. The agreement also includes a framework for trade and investment related through a co-funded work programmed. The joint work program will support technical assistance and capacity building activities in various trade-related areas to strengthen commercial links and help stimulate two-way investment.

■ Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)

To respond to various dynamics of changes in the world economy and to make strengthening world markets that remain open an essential part of the recovery and strengthening of the global economy, the Government of Indonesia has signed the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) on 15 November 2020. RCEP is a regional trading block agreement largest in the world, covering 30% of world GDP, 27% of world trade, 29% of world foreign direct investment and 29% of world population

The RCEP Agreement was Indonesia's initiative when it became Chair of ASEAN in 2011, where Indonesia was then entrusted to be the coordinator leading the way for the RCEP Agreement negotiations. Currently, there are 7 ASEAN Countries (Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Singapore, Vietnam and Myanmar) and 5 ASEAN Partner Countries (PRC, Japan, Australia, New



Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan 5 Negara Mitra ASEAN (RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan).

Implementasi Perjanjian RCEP akan mendatangkan berbagai manfaat bagi Indonesia, di antaranya adalah kepastian dan keseragaman aturan perdagangan, iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan peluang usaha barang, jasa dan investasi, serta penguatan integrasi ke dalam **Regional Value Chain** (RVC).

Perjanjian RCEP memiliki keunggulan utama yaitu menyederhanakan aturan Free Trade Agreement (FTA). Melalui mekanisme RCEP akan digunakan satu jenis Surat Keterangan Asal (SKA) di seluruh kawasan RCEP sehingga menghemat biaya perdagangan. Selain mendorong ekspor ke negara anggota RCEP, Indonesia dapat menarik lebih banyak **Foreign Direct Investment** dengan dukungan fasilitasi kemudahan investasi, alih teknologi, dan kepastian hukum investasi yang diatur di dalam RCEP.

Selain dua contoh perjanjian Kerjasama di atas, masih banyak lagi perjanjian perdagangan maupun investasi yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Lalu bagaimana peran Direktorat PPHNak dalam perjanjian-perjanjian tersebut?

Tentunya PPHNak sebagai Direktorat Teknis yang menangani fungsi hilir ikut serta berperan aktif dalam pembahasan dan implementasi setiap perjanjian, terutama dalam hal aspek pemasaran hasil dan investasi peternakan.

Salah satu implementasi perjanjian PPHNak juga selalu berperan aktif dalam keanggotaan Working Group sebagai turunan pelaksanaan dari perjanjian - perjanjian tersebut di level Kementerian/Lembaga Teknis. PPHNak juga selalu mengajukan usulan posisi untuk dapat mendorong aspek promosi dan akses pasar hasil peternakan serta bagaimana upaya untuk meningkatkan kegiatan yang dapat menarik investasi atau pengembangan usaha peternakan dari negara lain di Indonesia. (ahw)

Zealand and South Korea).

Implementation of the RCEP Agreement will bring various benefits to Indonesia, including certainty and uniformity of trade rules, a more conducive investment climate, increased business opportunities for goods, services and investment, as well as strengthening integration into the Regional Value Chain (RVC).

RCEP agreement has the main advantage of simplifying the Free Trade Agreement (FTA) rules. Through the RCEP mechanism, one type of Certificate of Origin (COO) will be used throughout the RCEP area, thus saving trade costs. In addition to encouraging exports to RCEP member countries, Indonesia can attract more Foreign Direct Investment with the support of investment facilitation, technology transfer, and investment legal certainty regulated in the RCEP.

In addition to the two examples of Cooperation agreements above, there are many more trade and investment agreements that have been signed by the Indonesian government. Then what is the role of Directorate of Processing and Marketing of Livestock Product (DPMLP) in these agreements? Of course, DPMLP as the Technical Directorate that handles downstream functions takes an active role in the discussion and implementation of each partnership agreement, especially in terms of marketing and investment livestock aspects.

DPMLP always play an active role in the membership of the Working Groups / Technical Groups/ Task Forces as a derivative of the implementation of these agreements at the Ministries/Technical Institutions level. DPMLP also always propose position to encourage aspects of promotion and market access for livestock products as well as efforts to increase activities that can attract investment or development of livestock businesses from other countries in Indonesia. (ahw)